

# Kemiskinan di DIY

Y Sri Susilo

**B**ERDASARKAN data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode tahun 2005-2012, persentase penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lebih tinggi dari prosentase penduduk miskin Indonesia. Selama periode tersebut persentase penduduk miskin di DIY rata-rata sebesar 17,70 persen, sedangkan persentase penduduk miskin Indonesia rata-rata mencapai 14,725 persen. Sebagai informasi, garis kemiskinan di DIY sebesar Rp 270.110/kapita/bulan pada September 2012. Dengan garis kemiskinan tersebut jumlah penduduk miskin di DIY mencapai 562,11 ribu jiwa atau 15,88 persen dari total jumlah penduduk DIY. Mengacu data tahun 2002, tingkat kemiskinan di DIY paling tinggi di pulau Jawa. Tingkat kemiskinan di wilayah Jawa Tengah hanya mencapai 14,98 persen, Jawa Timur 13,08 persen, Jawa Barat 9,89 persen, Banten 5,71 persen dan DKI Jakarta hanya 3,7 persen.

Pemprov DIY bersama pemerintah kabupaten/kota telah berupaya menekan angka kemiskinan. Berbagai program pemerintah telah diterapkan dan disinergikan untuk mengembangkan wilayah yang termasuk kantong-kantong kemiskinan. Wilayah yang termasuk daerah miskin, digelontorkan berbagai program yang sifatnya pemberdayaan. Secara garis besar, strategi penanggulangan kemiskinan (*pro poor* dan *pro job*) yang telah diterapkan Pemprov DIY adalah 1) Peningkatan produktivitas/kapasitas penduduk miskin melalui berbagai program pemberdayaan. 2) Peningkatan daya beli masyarakat miskin melalui pengendalian inflasi, stabilisasi harga bahan pokok, kebijakan subsidi dan bantuan sosial. 3) Peningkatan akses terhadap akses pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan infrastruktur lainnya. 4) Peningkatan akses pasar yang mencakup ketersediaan pasar, akses terhadap sumber daya permodalan dan pemberdayaan UMKM. 5) Pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana (KB) dan program-program terkait lainnya.

Strategi penanggulangan kemiskinan tersebut hasilnya akan optimal jika terjadi sinergi dan koordinasi diantara satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang terkait. Di samping itu juga diperlukan sinergi dan koordinasi di anta-

ra *stakeholders* yaitu Pemprov DIY, Pemkab/ Pemkot, BPS DIY, Kantor Perwakilan BI DIY, Perbankan/Lembaga Keuangan, Asosiasi Pengusaha/Produsen, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi (PT). Fakta di lapangan program-program yang ada berjalan sendiri-sendiri. Belum terjadi sinergi dan koordinasi diantara pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan program anti kemiskinan. Harus diakui kata sinergi dan koordinasi mudah untuk diucapkan namun sulit dalam implementasinya.

Dalam konteks mengurangi kemiskinan di wilayah DIY sebenarnya dapat mengoptimalkan peran usaha kecil mikro dan menengah (UMKM), termasuk di dalamnya industri kecil dan menengah (IKM). Berdasarkan Sensus Ekonomi BPS (2006) tercatat 403 ribu unit usaha di wilayah DIY. Dari jumlah tersebut 99 persen tergolong Usaha UMKM. Selanjutnya menurut data Disperindagkop DIY (2011) ada 80.056 unit usaha yang tergolong IKM dengan tenaga kerja 295.461 orang. Berdasarkan data tersebut UMKM, termasuk IKM, mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian DIY.

Sejalan hal tersebut, berbagai program pengembangan UMKM sebenarnya sekaligus program untuk menanggulangi atau mengurangi kemiskinan. Jika program pengembangan tersebut berhasil, UKM dapat tumbuh dan berkembang. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran. Putaran selanjutnya dengan menurunnya pengangguran, angka kemiskinan dapat berkurang. Sejalan dengan hal tersebut UMKM perlu didorong tumbuh dan berkembang. Dorongan itu melalui peningkatan akses terhadap 1) sumber pembiayaan, 2) pemasaran, 3) produksi, 4) sumber daya manusia dan 5) teknologi informasi.

Peran PT juga dapat dioptimalkan dalam rangka menang-

gulasi atau mengurangi kemiskinan. Di DIY terdapat 118 PT negeri/swasta. Optimalisasi kontribusi PT dapat dilakukan melalui program *one faculty/department one village/sub-village* (OFOV). Dalam hal ini dapat diartikan satu fakultas/jurusan/Prodi melakukan program pembinaan/ pemberdayaan terhadap satu desa/kelurahan /dusun/kampung yang termasuk kategori miskin atau mayoritas penduduknya termasuk kategori miskin.

Program OFOV bisa berjalan dengan baik dan hasilnya optimal, jika dikoordinasikan dengan *stakeholders* yang lain. Seperti diketahui PT mempunyai sumber daya manusia, termasuk di dalamnya Iptek, yang dapat diandalkan, namun relatif terbatas dalam sumber daya modal atau finansial. Sebagai contoh, program pembinaan UMKM oleh BUMN hasilnya akan lebih optimal jika dalam pendampingan di lapangan melibatkan PT. Demikian pula program kuliah kerja nyata (KKN) dan pengabdian pada masyarakat jika program kerja yang disusun dengan program kerja Pemda/Pemkot/Pemkab hasilnya lebih efektif. Demikian pula berbagai program kerja kementerian dapat berjalan dengan efektif dan hasilnya lebih optimal jika *stakeholders* lain, termasuk PT, dilibatkan dalam pelaksanaannya. Penulis tetap percaya meskipun sulit, namun bukan hal yang mustahil untuk diimplementasikan. □ - g.

\*) **Y Sri Susilo**, Dosen FE, UAJY,  
Pengurus ISEI Cabang Yogyakarta dan  
Pengurus Pusat ISEI.